

## Aktualisasi Sumber Daya *Soft Power* Indonesia di Kawasan Oseania dalam Pacific Exposition 2019

Muchamad Iqbal Maulana<sup>1\*</sup>, Muhammad Riza Hanafi<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: iqbal.maoel@gmail.com

<sup>1,2</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i1.25490

---

### Abstract

Indonesia's presence in Oceania tends to be minimal even though several strategic issues originate in the region, for example the consistency of several countries supporting Papuan independence. On the other hand, Indonesia has social and cultural modalities because part of its territory is culturally connected to Oceania. This study aims to explain how Indonesia's soft power resources are used in the 2019 Pacific Exposition agenda. The Pacific Exposition is an event organized by the Indonesian Embassy in New Zealand and the 2019 event is the first. This research uses Joseph S. Nye's concept of soft power that has three sources: culture, political values and foreign policy. The researcher then explained how the Indonesian modalities in these three sources were used in the 2019 Pacific Exposition series of events. In the cultural category, what emerged were cultural similarities between Timur and Oceanian peoples, especially Melanesians, while the political values conveyed were multiculturalism. Meanwhile, Indonesia's foreign policy foundation of *bebas aktif* (free and active) was also introduced.

### Abstrak

Kehadiran Indonesia di Oseania cenderung minimal meskipun beberapa isu strategis berasal dari kawasan tersebut, misal konsistensi beberapa negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Di sisi lain, Indonesia memiliki modalitas sosial dan budaya karena sebagian dari wilayahnya terhubung dengan Oseania secara budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sumber soft power Indonesia digunakan dalam agenda Pacific Exposition 2019. Pacific Exposition adalah acara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di New Zealand dan perhelatan 2019 adalah yang pertama. Penelitian ini menggunakan konsep soft power Joseph S. Nye. Jr yang memiliki tiga sumber yakni: budaya, nilai politik dan kebijakan luar negeri. Peneliti kemudian menjelaskan bagaimana modalitas Indonesia dalam tiga sumber soft power tersebut digunakan dalam rangkaian acara Pacific Exposition 2019. Dalam kategori budaya, yang dimunculkan adalah kesamaan budaya antara masyarakat Timur dengan masyarakat Oseania, terutama Melanesia, sedangkan nilai politik yang disampaikan adalah multikulturalisme. Sementara kebijakan luar negeri Indonesia yang diperkenalkan dalam perhelatan tersebut adalah politik bebas aktif yang selama ini menjadi landasan Indonesia dalam berpolitik internasional.

### Keywords

*Diplomacy, Indonesia, Pacific Exposition 2019, Oceania, Soft Power*

### Article History

Received March, 17

Revised June, 24

Accepted June, 27

Published June, 29

### Corresponding Author

Muchamad Iqbal Maulana.  
Program Studi Hubungan  
Internasional, Universitas  
Brawijaya, Jalan Veteran,  
Ketawanggede, Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang,  
65145.

## Pendahuluan

Posisi Indonesia yang berada di dua kawasan global, Asia Tenggara di barat dan Oseania di timur, menyebabkan negara ini memiliki keunggulan geopolitik karena bisa memberikan pengaruh ke dua kawasan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara dan Oseania memiliki perbedaan. Asia Tenggara menjadi ‘halaman depan’ dalam politik luar negeri Indonesia, sementara Oseania hanya dianggap sebagai “halaman belakang” belaka (Wardhani, 2015).

Jika melihat dari Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) Tahun 2015, proyeksi ancaman terbesar bagi kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasal dari Asia Tenggara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). *Security dilemma* akhirnya menjadi hal yang dihadapi Indonesia ketika menghadapi berbagai ancaman tradisional maupun non-tradisional yang datang dari Kawasan Asia Tenggara (Nugraha, 2017). Beberapa contoh isu yang menjadi potensi ancaman bagi Indonesia yang berasal dari Asia Tenggara adalah konflik Laut China Selatan. Konflik tersebut menjadi ancaman bagi kedaulatan laut Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara (Sinaga dan Robertua, 2017). Selain itu, Indonesia juga pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan yang sekarang menjadi wilayah kedaulatan dari Malaysia (Nugraheny, 2020). Kemudian, ancaman non-tradisional yang datang dari Kawasan Asia Tenggara antara lain terorisme, bajak laut, penyelundupan (Ariyanti, 2019), serta kabut asap yang menjadi isu lingkungan (Chow, 2020). Dengan adanya potensi ancaman dan kompleksitas isu politik di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempatkan kawasan tersebut sebagai zona konsentris pertama dalam pelaksanaan diplomasi dan politik luar negerinya (Wardhani, 2015). Apalagi Indonesia merupakan salah satu *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), sehingga memiliki modalitas politik yang cukup untuk hadir di kawasan Asia Tenggara.

Dalam bidang ekonomi, proyeksi keuntungan Indonesia juga lebih besar ketika melakukan perdagangan di Kawasan Asia Tenggara (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015b). Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 produktivitas perdagangan dan ekspor Indonesia di Kawasan Asia Tenggara memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional Indonesia (Lee, 2011). Menurut data OECD 2019, presentase dan nilai perdagangan terbesar Indonesia berasal dari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki persentase perdagangan di Asia Tenggara yang mencapai 24% dari jumlah keseluruhan perdagangan dengan negara-negara di dunia (OECD, 2019).

Kawasan Oseania menempati zona konsentris diplomasi kedua bagi Indonesia, berbeda dengan Asia Tenggara yang menjadi zona prioritas pertama bagi diplomasi strategis Indonesia (Wardhani, 2015). Hal tersebut dipengaruhi dari kepentingan nasional pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan yang tidak melihat Oseania sebagai kawasan yang berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia. Ini karena pada saat awal kemerdekaan negara-negara ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Rendahnya nilai strategis Oseania bagi Indonesia juga terlihat ketika dari tahun 1980-an hingga 2010 pemerintah Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara kepulauan di Oseania. Selain itu, jika dibandingkan dengan Asia Tenggara, kompleksitas isu yang berada di Oseania tidak terlalu berpengaruh pada kepentingan nasional Indonesia (Wardhani, 2015).

Penempatan Oseania sebagai prioritas kedua juga tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dimiliki negara-negara Oseania dalam bidang perdagangan. Misalnya, GDP negara-negara

kepulauan Oseania pada tahun 2018 hanya berkisar pada angka USD 10, 649 miliar (World Bank, 2020). Berbeda dengan Asia Tenggara yang memiliki GDP sebesar USD 3 triliun pada tahun 2018 (ASEAN Sekretariat, 2019). Dari data tersebut dapat terlihat bahwa prospek perdagangan Indonesia di Asia Tenggara lebih menguntungkan daripada negara-negara kepulauan di Oseania. Daya beli dan pendapatan nasional negara-negara Oseania yang lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara menyebabkan Indonesia masih belum memiliki fokus untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara di Oseania. Selain itu, akses pasar produk Indonesia ke Oseania juga terbatas, karena jaraknya yang lebih jauh dan kawasan tersebut yang cenderung terisolir dari jalur pelayaran internasional.

Menariknya, keterbatasan ekspor komoditi-komoditi Indonesia ke Oseania ternyata memiliki jumlah neraca perdagangan negatif. Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2018 yang telah diolah penulis, neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara Oseania mengalami defisit sebanyak USD 3, 25 miliar (Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), 2019a). Defisit perdagangan terbesar datang dari Kepulauan Marshall, Australia, serta Selandia Baru. Keterbatasan akses pasar menjadi permasalahan utama dalam penjualan produk Indonesia di Oseania. Maka dari itu, penting untuk melihat upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi serta penyusunan inisiasi agenda regional yang memungkinkan dalam mengeksport produknya. Aktivitas tersebut juga termasuk meningkatkan investor dari Oseania dalam pengembangan sektor industri maupun jasa unggulan di Indonesia.

Berbagai isu strategis mulai muncul tahun 2010, misal politisasi dan pemberian dukungan negara-negara kepulauan Oseania terhadap upaya separatisme Papua Barat yang dipelopori *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) (Lantang dan Tambunan, 2021). Selain isu separatisme Papua Barat yang mengancam kedaulatan Indonesia, isu-isu strategis Indonesia yang berpotensi muncul dari Oseania antara lain perdagangan barang-barang ilegal, lokasi penyuangan uang, kejahatan transnasional, serta penyelundupan manusia (Wardhani, 2015). Kehadiran Tiongkok yang menjadi kekuatan baru di Oseania juga dapat menghasilkan kompleksitas keamanan regional dan berpengaruh terhadap keamanan nasional Indonesia (Zhang, 2020). Atas munculnya berbagai isu tersebut, Indonesia perlu untuk menunjukkan kehadirannya dalam politik regional Oseania demi mempertahankan kedaulatan dan mengartikulasikan kepentingan nasionalnya.

Jika melihat karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Timur, Indonesia memiliki irisan dengan kawasan Oseania karena sama-sama berasal dari sub-etnis Melanesia. Daerah-daerah yang termasuk dalam sub-etnis Melanesia antara lain Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dapat terlihat dari ciri fisik masyarakat asli di sana dan ritual adat yang menyerupai etnis di negara-negara Oseania (Wardhani, 2015). Selain itu, penting untuk menghadirkan mereka dalam agenda diplomatik di Oseania sebagai implementasi dari *pro people diplomacy* — bentuk diplomasi ini merujuk kepada upaya diplomasi yang berorientasi kepada kepentingan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat— yang menjadi filosofi diplomasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Andika, 2016). Hal ini merupakan modalitas penting bagi Indonesia untuk menghadirkan dirinya di kawasan Oseania.

Sejauh ini, untuk menunjukkan kehadirannya di Oseania, Indonesia melakukan *top level diplomacy* — merupakan bentuk diplomasi yang melibatkan antaraktor pemerintah suatu negara dengan pendekatan formal, juga disebut *track one diplomacy* (de Magalhaes, 1988). Hal tersebut diaktualisasikan dengan melakukan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan

negara-negara Oseania, seperti Tuvalu, Nauru, dan Kiribati (Satriawan, 2016). Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukan *cheque book diplomacy* dengan memberikan bantuan luar negeri kepada Fiji (Elmslie, 2015). Sebagai *associate member* dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) serta *dialogue partner* dalam Pacific Islands Forum (PIF), Indonesia juga turut menghadiri forum-forum tersebut untuk mengartikulasikan kepentingan strategisnya di Oseania (Wardhani, 2015). Namun, upaya *top level diplomacy* yang menekankan pendekatan formal antara pemerintah belum cukup untuk menghadirkan Indonesia dalam politik regional Oseania. Buktinya, beberapa negara Oseania seperti Vanuatu secara konsisten mempertanyakan keanggotaan Indonesia di MSG yang tidak selaras dengan cita-cita anti kolonialisme organisasi tersebut karena dianggap masih “menjajah” Papua.

Dalam konteks kebudayaan kawasan, Indonesia memiliki modalitas dalam menjustifikasi posisinya sebagai bagian dari kawasan Oseania. Indonesia dan Oseania memiliki persamaan rumpun etnisitas yang dimiliki masyarakatnya, yaitu bangsa Austronesia (Wardhani, 2015). Adanya identitas kolektif (*shared identity*) tersebut memperlihatkan adanya rasa persaudaraan masyarakat Oseania dengan Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya *low level diplomacy* — merujuk kepada aktivitas diplomasi yang menghubungkan masyarakat di satu negara dengan negara lain dengan pendekatan informal, juga dikenal dengan istilah *track two diplomacy* — yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadirkan kebudayaan dan partisipasi masyarakat dalam proyek diplomasi ke Oseania. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan suatu agenda yang dapat mempertemukan Indonesia dengan negara-negara secara multilateral. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia bersama KBRI Wellington kemudian menginisiasi penyelenggaraan Pacific Exposition 2019 di Auckland, Selandia Baru. Pacific Exposition 2019 merupakan sebuah agenda eksposisi perdagangan yang menampilkan produk-produk dari Indonesia serta negara-negara Oseania yang hadir dalam agenda tersebut. Produk-produk yang dipromosikan dan diperjualbelikan dalam Pacific Exposition 2019 merupakan produk ekspor strategis dari negara-negara yang hadir. Namun tidak hanya tentang pameran produk ekspor strategis dan investasi, penampilan seni kebudayaan masyarakat adat serta forum multilateral dan bilateral juga diselenggarakan dalam Pacific Exposition 2019 (Pacific Exposition Official Website, 2021). Dengan inisiasi tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk mengaktualisasikan kehadirannya di Oseania sekaligus menjustifikasi posisinya sebagai bagian dari kawasan tersebut.

Penelitian terdahulu tentang Pacific Exposition 2019 dapat dilihat dalam artikel *The Pacific Exposition 2019: Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pendekatannya dengan Kawasan Pasifik* yang ditulis oleh Pratama dan Sulaiman. Penelitian tersebut berfokus dalam menempatkan Pacific Exposition 2019 sebagai kebijakan luar negeri Indonesia ke wilayah Oseania. Penelitian ini menggunakan Teori Birokrasi Politik dan Teori Komunitas Kebijakan (Opini Publik) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pratama dan Sulaiman (2021) membahas urgensi dari adanya isu separatisme Papua Barat yang dipelopori oleh ULMWP. Maka dari itu, Indonesia mengartikulasikan kekuasaan dan kepetingan nasionalnya kepada negara-negara di Oseania melalui Pacific Exposition 2019 untuk mempertahankan kedaulatan atas Papua Barat. Pratama dan Sulaiman melihat bahwa Pacific Exposition 2019 juga menggunakan pendekatan ekonomi dan komunikasi publik berdasarkan *shared identity* Indonesia yang beririsan dengan kebudayaan negara-negara Oseania (Pratama & Sulaiman, 2021).

Namun, penelitian tersebut tidak menjelaskan tentang pendekatan kebudayaan yang menjadi elemen esensial dalam kerangka diplomasi di Oseania. Maka dari itu, penelitian tersebut bersifat state-centric, mengingat konteks kebudayaan menjadi basis esensial dalam pendekatan Indonesia kepada masyarakat Oseania (Slatter, 2015). Sementara penelitian ini melihat bagaimana soft power digunakan dalam perhelatan tersebut. Menurut Nye (2004), suatu negara dapat mengartikulasikan *soft power* berdasarkan penggunaan sumber daya berupa kebudayaan, nilai politik, serta kebijakan luar negeri yang dimiliki (Nye, 2004). Dalam konteks ini Indonesia memiliki peluang untuk hadir di Oseania melalui pemanfaatan sumber *soft power* berupa kebudayaan, terutama kebudayaan Indonesia Timur yang beririsan dengan kebudayaan Melanesia di Oseania. Bagaimana kebudayaan sebagai sumber dari soft power digunakan Indonesia untuk meningkatkan kehadirannya melalui penyelenggaraan Pacific Exposition 2019 akan dielaborasi dalam tulisan ini.

### **Kerangka Konseptual: *Soft Power***

Joseph S. Nye Jr. (2004) mengklasifikasikan dua jenis kekuasaan jika dilihat dari pendekatannya, yaitu *hard power* dan *soft power*. Pendekatan *hard power* sendiri memiliki prinsip yang dianalogikan oleh Nye dengan istilah “*stick and carrot*” (Nye, 2004). Istilah tersebut merujuk kepada sifat kekuasaan yang koersif dengan memaksakan suatu kekuasaan demi mencapai kepentingan yang diinginkan. Nye mengilustrasikan jika suatu aktor politik mampu melaksanakan perintah dari aktor politik yang memiliki kuasa atas dirinya, maka ia akan memperoleh penghargaan atau apresiasi dari tindakan kepatuhannya. Namun, apabila suatu aktor melanggar perintah dari aktor politik yang berkuasa atas dirinya, maka ia akan mendapat hukuman.

*Soft power* memerlukan pendekatan dan memperhatikan preferensi dari audiensnya, sehingga kekuasaan tersebut dapat diterima secara berkelanjutan tanpa adanya suatu unsur pemaksaan (Nye, 2004). *Soft power* dapat diterima apabila antara negara yang memiliki kekuasaan dan audiens saling memahami isu atau topik yang didiskusikan satu sama lain (Nye, 2004). Suatu negara mencapai kepentingannya dalam politik internasional karena dipengaruhi oleh negara lain yang mengikutinya dengan cara memuji nilai atau identitas nasional, meniru contoh, dan mewujudkan cita-cita bersama yang terbuka dan berkelanjutan. Dalam hal ini, negara tidak perlu memaksakan suatu kekuasaan kepada negara lain. Selama agenda politik dan nilai suatu negara dianggap menarik maka hal tersebut mempengaruhi tingkah laku negara lain (Nye, 2004). Karena itu, Nye mengatakan bahwa *soft power* juga bisa disebut sebagai power of attraction.

*Soft power* menjadi elemen penting yang perlu dilakukan oleh setiap negara dalam politik internasional. Dalam praktiknya, *soft power* dengan diplomasi publik memiliki keterkaitan erat. Diplomasi publik merupakan upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi masyarakat di negara lain yang nantinya akan mempengaruhi pemerintahnya pula, dengan memperhatikan nilai konsensus masyarakat yang melibatkan aktivitas dalam aspek informasi, edukasi, serta pendekatan kebudayaan. Diplomasi publik juga menjadi alat untuk mempengaruhi opini dan memobilisasi dukungan audiens asing terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (van Ham, 2005). Promosi citra positif yang ditampilkan dalam aktivitas diplomasi publik juga menjadi proyeksi *soft power*. Diplomasi publik juga harus disusun dalam suatu agenda secara sistematis, agar artikulasi *soft power* suatu negara dapat diterima dan menghandirkan preferensi baru bagi audiens (Nye, 2004). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik merupakan alat untuk membangun dan mengartikulasikan *soft power* suatu negara yang diaktualisasikan dalam suatu agenda diplomatik.

Nye menjelaskan ada tiga sumber daya yang dapat digunakan suatu negara untuk mengartikulasikan *soft power*, yakni: a) Budaya; b) Nilai-nilai politik, serta; c) Kebijakan luar negeri. Untuk mengidentifikasi budaya yang digunakan dalam *soft power*, Nye melihat budaya sebagai seperangkat nilai dan kebiasaan yang menciptakan suatu pandangan dalam lingkungan sosial masyarakat. Nye mengidentifikasi bahwa hubungan antara *high culture* yang meliputi literatur sastra atau filsafat, kesenian, dan pendidikan, yang hanya diajarkan kepada kaum elit, serta budaya populer (Nye, 2004). Dalam hal ini, budaya populer diklasifikasikan sebagai *low culture* yang merefleksikan budaya yang dapat dipahami dan diinternalisasi seluruh lapisan masyarakat, misalnya musik, tari-tarian populer, dan *fashion* (gaya berbusana) (Davies dan Franklin, 2015). Namun, budaya yang direfleksikan dalam *soft power* harus menarik dengan memperhatikan orientasi kepada nilai dan kebudayaan yang diinternalisasi audiens untuk meningkatkan potensi penerimaannya.

Nilai politik yang menjadi sumber dari *soft power* ketika tercipta hubungan atraktif yang diciptakan dari adanya promosi nilai kolektif yang dipahami oleh antara negara promotor serta negara-negara audiens (Nye, 2004). Sehingga, promosi nilai tetap harus memperhatikan nilai, budaya, preferensi politik, serta kepentingan dari negara audiens. Nilai politik yang dipromosikan juga harus memperhatikan konteks dalam agenda politik yang hendak diartikulasikan. Negara promotor harus memahami apa isu bersama yang sedang dan akan dihadapi oleh dirinya beserta negara audiensnya. Nilai-nilai politik yang direfleksikan oleh organisasi internasional atau regional serta budaya populer dapat meningkatkan potensi penerimaan *soft power*, selama adanya pemahaman yang sama dengan negara-negara audiens.

*Soft power* bisa juga bersumber pada kebijakan luar negerinya suatu negara. Kebijakan luar negeri dapat menjadi *soft power* apabila kebijakan tersebut dilegitimasi oleh masyarakat di negara asal serta negara audiens, serta memiliki refleksi otoritas moral (Nye, 2004). Karena terkait dengan legitimasi di negara asal, maka kebijakan dalam negeri yang diproyeksikan keluar pun juga menjadi sumber dari *soft power*. Kebijakan luar negeri yang dipromosikan dalam *soft power* suatu negara harus tepat sasaran sesuai dengan kondisi politik negara audiens. Nye mencotohkan ketika Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan anti-rasialisme sejak tahun 1950 dan menarik bagi negara-negara Afrika, sehingga negara-negara Afrika dapat melakukan hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat. Mengingat bahwa kebijakan sebagai *soft power* juga menjadi instrumen dalam artikulasi kepentingan nasional maupun kebijakan luar negeri yang persuasif dan menghindari potensi adanya konflik antarnegara.

Sumber daya *soft power* dengan konsepsi *soft power* itu sendiri pada dasarnya merupakan hal yang berbeda. Namun, sumber daya *soft power* yang dimiliki suatu negara dan ditampilkan kepada negara audiens dapat menunjukkan implementasi konsep *soft power* dari negara yang mengartikulasikannya. Adanya perbedaan tersebut terlihat dari adanya elemen-elemen yang membentuk citra suatu negara kepada masyarakat di negara lain. Dengan adanya penampilan dan promosi dari sumber daya *soft power* yang dimiliki, negara dapat mempengaruhi negara lain untuk memahami kepentingan dari negara yang mengartikulasikan *soft power* miliknya (Nye, 2004). Maka dari itu, konsep *soft power* dengan sumber daya *soft power* merupakan hal yang berbeda dalam hubungannya, namun saling berkaitan satu sama lain.

## Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, yaitu dengan cara memebrikan deskripsi gambaran tentang objek yang diteliti data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti penelitian ini bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sifat (perilaku) yang dapat diamati, serta memperoleh perspektif baru dari objek yang diteliti (Silalahi, 2012). Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini berasal dari notulensi pernyataan Duta Besar Keliling Republik Indonesia untuk Pasifik Selatan periode 2020-2021, Tantowi Yahya, serta data dari webinar yang diselenggarakan KBRI Wellington yang membahas Pacific Exposition 2019. Data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan agenda tersebut, seperti buku, jurnal, rilis dokumen, laporan resmi, serta portal berita yang relevan dalam mendukung substansi pembahasan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

Memperhatikan uraian dari latar belakang, kerangka konseptual, serta metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian ini akan membahas tentang analisis sumber daya *soft power* Indonesia dalam Pacific Exposition 2019 untuk menghadirkan legitimasinya di Oseania. Analisis ini menggunakan elemen-elemen sumber daya *soft power*, yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik, serta kebijakan luar negeri Indonesia yang direfleksikan dalam Pacific Exposition 2019. Sebelum mendalami analisis berdasarkan elemen-elemen tersebut, penting untuk mengetahui gambaran umum agenda Pacific Exposition 2019 yang meliputi pihak penyelenggara, negara-negara yang hadir, serta forum-forum yang diakomodasi dalam rangkaian agenda tersebut.

### Profil Pacific Exposition 2019

Pacific Exposition 2019 diselenggarakan pada 11-14 Juli 2019 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Wellington, Selandia Baru. Acara ini dihadiri oleh 19 negara dan teritori di wilayah Oseania, antara lain Indonesia, PNG, Australia, Selandia Baru, Kepulauan Cook, Fiji, Federasi Mikronesia, Kiribati, Polinesia Perancis, Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Palau, Niue, Samoa, Timor Leste, Kaledonia Baru, Tuvalu, dan Vanuatu. Sebagai agenda pameran kebudayaan dan komoditi-komoditi ekspor di Oseania, sebanyak 123 perusahaan dari negara-negara tersebut juga hadir dalam rangkaian acara Pacific Exposition 2019 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019; Maharani, 2019b). Acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama, kampanye identitas bersama sebagai masyarakat Oseania, serta perluasan akses pasar produk ekspor di negara-negara Oseania (Asia Today, 2020).

Acara inti dalam Pacific Exposition 2019 adalah *Trade Exhibition*, yaitu pameran dan penjualan produk ekspor Indonesia dan negara-negara Oseania pada 11-14 Juli 2019. *Trade Exhibition* diselenggarakan dengan pameran produk dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari Indonesia dan negara-negara Oseania. Pada sesi *Trade Exhibition*, pengunjung dapat membeli produk-produk yang dijual oleh perusahaan pada gerai (*booth*) masing-masing (Maharani, 2019b). Dalam pelaksanaannya, agenda Pacific Exposition 2019 juga memiliki agenda tambahan, antara lain forum regional, forum bilateral, serta pertunjukan kesenian masyarakat adat Oseania. Forum-

forum regional yang terdapat pada Pacific Exposition 2019 antara lain *Business and Investment Forum*, *Pacific Cultural Forum*, serta *Pacific Tourism Forum*. Di luar forum regional tersebut, negara-negara peserta dapat melakukan forum bilateral sesuai kesepakatan masing-masing negara pada sela rangkaian acara Pacific Exposition 2019.

Pentas seni dalam Pacific Exposition 2019 diselenggarakan dalam acara *Pacific Cultural Performance* dan Konser *Sound of the Pacific*. *Pacific Cultural Performance* menampilkan pentas seni dan tradisi kebudayaan lokal masyarakat Oseania, seperti tarian dan musik tradisional. Selain pertunjukan pentas seni dan kebudayaan, *Pacific Cultural Performance* juga menghadirkan pameran busana tradisional negara-negara Oseania yang dikemas dalam bentuk acara *fashion show* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019; Sobuber, 2019). Pacific Exposition 2019 juga memiliki acara konser musik dengan tema *Sound of the Pacific*, yang menghadirkan penyanyi-penyanyi populer dari negara-negara yang berpartisipasi.

Pacific Exposition 2019 menetapkan beberapa target dalam pelaksanaannya, baik dalam target nilai transaksi dan audiens. Target transaksi awal yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam ekposisi perdagangan Pacific Exposition 2019 adalah USD 100 Juta yang setara IDR 1,4 triliun dalam bidang hiburan, bisnis (investasi), pariwisata, dan perdagangan (Astra Internasional, 2019). Sedangkan untuk target audiens, KBRI Wellington memfokuskan terhadap kehadiran Indonesia kepada masyarakat dan pemerintah negara-negara Oseania secara umum (Khumaini, 2019). Maka dari itu, Pacific Exposition 2019 mengundang masyarakat Oseania dari berbagai kelompok sosial, seperti masyarakat adat, pengusaha (swasta), masyarakat umum, serta akademisi (Yahya, 2020).

### **Menghadirkan Kebudayaan Timur**

Kebudayaan masyarakat lokal Oseania menjadi faktor integrasi esensial bagi kawasan Oseania secara historis maupun filosofis (Hau'ofa, 1998). Dengan adanya kebudayaan, masyarakat di kawasan tersebut dapat memahami tentang keberagaman adat dan budaya yang membangun konstruksi yang menjunjung nilai-nilai luhur kebudayaan (Hau'ofa, 1994). Untuk memahami pengaruh *soft power* Indonesia melalui aspek kebudayaan, perlu memahami *hard culture* dan *pop culture* yang ditampilkan dalam Pacific Exposition 2019. *Hard culture* dapat dilihat sebagai tradisi yang dihasilkan dari kebiasaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur yang diinternalisasi dan dilestarikan secara turun-temurun (van den Haak, 2018). Sedangkan, *pop culture* mengacu kebudayaan populer yang diminati oleh masyarakat secara luas melalui konsensus informal (Davies & Franklin, 2015).

Dalam Pacific Exposition 2019, Indonesia menghadirkan masyarakat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kehadiran masyarakat dari kelima provinsi tersebut dimaksudkan Indonesia bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Oseania. Selain itu, Indonesia juga mempertunjukkan bentuk kebudayaan Indonesia Timur yang memiliki persamaan karakteristik dengan kebudayaan di Oseania. Dengan demikian, Indonesia dapat memposisikan kebudayaan timurnya sebagai budaya strategis yang ditampilkan kepada negara-negara Oseania dalam Pacific Exposition 2019.

Nilai strategis kebudayaan Indonesia diperlihatkan dengan penabuhan Tifa dalam pembukaan Pacific Exposition 2019. Penabuhan Tifa oleh perwakilan negara-negara yang hadir menunjukkan bahwa alat musik tradisional tersebut menjadi simbol integrasi dan refleksi identitas



kolektif masyarakat Oseania (Maharani, 2019c). Simbolisasi tersebut juga digunakan Indonesia untuk menjustifikasi keterkaitan dengan Oseania dalam dimensi kebudayaan. Mengingat, tifa merupakan alat musik tradisional yang digunakan dalam ritual kebudayaan suku-suku di Papua Barat, seperti Asmat, Dani, dan Merweri (Rumansara, 2003). Tifa juga digunakan sebagai alat musik tradisional negara-negara Oseania, terutama di Papua Nugini.

Melihat dari filosofinya, penabuhan tifa juga menjadi sarana komunikasi masyarakat leluhur masyarakat Oseania (Rai, 2020). Komunikasi dengan ritual penabuhan tifa dilakukan dalam acara ritual adat masyarakat Melanesia untuk menghormati roh para leluhur yang menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat Oseania (Kapisa, 1994; Rumansara, 2003). Tifa juga dapat memmanifestasikan adanya persahabatan antarmasyarakat Oseania karena dijadikan simbol jati diri, pemberi identitas, dan sarana penguat ikatan relasi sosial bagi masyarakat Tanah Papua (Rai, 2020). Dalam konteks Pacific Exposition 2019, penabuhan tifa dapat diartikan sebagai panjatan doa kepada leluhur ketika hendak memulai suatu acara sakral dan formal yang dilakukan oleh negara-negara Oseania dalam mempererat hubungan persaudaraan. Hal tersebut relevan dengan kepercayaan masyarakat Oseania terkait penghormatan leluhur dan aktualisasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penabuhan tifa juga merefleksikan adanya identitas kolektif yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara Oseania dalam segi etnomusikologi dan etnografi.

Ritual kebudayaan Oseania lain yang dihadirkan dalam Pacific Exposition 2019 adalah ritual *pohiri haka* yang berasal dari Suku Maori, Selandia Baru. Ritual tersebut dilakukan ketika suatu prosesi acara adat maupun agenda kenegaraan dimulai. Ritual *pohiri haka* memiliki dua makna dalam pelaksanaannya. *Pertama*, *Pohiri haka* memiliki filosofi untuk menyambut tamu kehormatan (*manuhiri*) yang datang pada suatu agenda penting kenegaraan atau adat. *Kedua*, *Pohiri haka* juga dimaknai sebagai refleksi eksistensi identitas dan kebudayaan Suku Maori (Mazer, 2011). Penempatan tarian *Pohiri* dalam pembukaan Pacific Exposition 2019 juga dimaknai sebagai doa dan penghormatan kepada leluhur-leluhur masyarakat adat Oseania, terutama kepada leluhur Suku Maori sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pacific Exposition 2019 (Local Government of New Zealand, n.d.). Dalam konteks Pacific Exposition 2019 yang diselenggarakan Indonesia, penampilan *pohiri haka* juga menjadi legitimasi Indonesia terhadap tradisi kebudayaan Suku Maori. Adapun legitimasi kultural tersebut juga menjadi modalitas penerimaan kehadiran Indonesia oleh negara-negara Oseania.

Selain *pohiri haka*, dalam *Pacific Cultural Performance* juga menampilkan tarian, musik tradisional, serta karya sastra lokal dari negara-negara Oseania. Hal ini dilakukan Indonesia untuk mengapresiasi pelestarian tradisi budaya masyarakat Oseania. Apresiasi dan pemahaman nilai kebudayaan menjadi penting bagi Indonesia dan negara-negara Oseania untuk memahami identitas kolektif yang mengintegrasikan kawasan tersebut. Hal tersebut relevan ketika budaya menjadi determinan utama yang mempengaruhi integrasi Oseania secara historis.

Dalam mengaktualisasikan keterkaitan identitas kolektif dan kehadirannya kepada masyarakat Oseania, Indonesia juga menunjukkan persamaan dialek bahasa Maori. Misalnya, 'lima' dalam bahasa Maori berarti *rima*, 'apa' berarti *aha*, 'ikan' berarti *ika*, 'dia' berarti *ia*, 'mata' berarti *mata*, 'telinga' berarti *taringa*, dan lain sebagainya (Habrianto, 2020; Yahya, 2020). Persamaan bahasa ini memperlihatkan adanya keterkaitan historis dan linguistik antara Indonesia dengan Oseania, terutama masyarakat Maori. Selain itu, menunjukkan keterkaitan bahasa juga menjadi upaya

Indonesia untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat Oseania untuk saling memahami sejarah dan identitas satu sama lain.

Selain *hard culture*, Indonesia juga menghadirkan budaya populer dari seniman nasionalnya dan seniman dari negara-negara yang hadir dalam Pacific Exposition 2019. Budaya populer yang dihadirkan antara lain pameran produk busana (*fashion show*) dan konser musik. Dalam *fashion show* pada agenda *Pacific Cultural Performance*, Indonesia menghadirkan busana dalam negerinya, terutama Kain Tenun (NTT) dan Batik Cendrawasih (Papua) sebagai pakaian yang merepresentasikan identitas Indonesia. (Sobuber, 2019; Yahya, 2021). Dalam Konser *Sound of The Pacific*, penyanyi Indonesia dan Oseania menampilkan karya musik mereka. Penyanyi asal Indonesia, Glenn Fredly, menyanyikan lagu *E Ipo* bersama empat penyanyi asal Oseania lainnya, yaitu Ellaphon Tauariki, Tree, dan Swiss. Adapun lagu tersebut diadaptasi dari lagu populer di Indonesia pada tahun 1980-an, kemudian diaransemen dalam bahasa Maori serta instrumen musik kontemporer. Konser musik tersebut juga mempertunjukkan aransemen kombinasi dari alat musik modern dengan tradisional dari Indonesia dan Oseania, misalnya sasando (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019; Yahya, 2020).

Dari penjelasan di atas, pertunjukan kebudayaan Indonesia dan negara-negara Oseania dalam Pacific Exposition 2019 dapat dimaknai dalam dua hal. *Pertama*, pertunjukan kebudayaan di atas dapat memperlihatkan adanya keterkaitan kebudayaan secara historis dan antropologis Indonesia dengan Oseania. Hal tersebutlah yang menunjukkan adanya identitas kolektif kawasan yang juga menjustifikasi bahwa Indonesia menjadi bagian dari Kawasan Oseania, terutama pada dimensi kebudayaannya. *Kedua*, pertunjukan kebudayaan tradisional dan kontemporer tersebut juga menjadi upaya pemasaran karya seni Indonesia kepada masyarakat di Oseania. Terutama untuk musik, popularitas lagu Indonesia di wilayah Oseania juga menjadi refleksi pengaruh Indonesia dalam konteks kebudayaan populer. Artinya tidak hanya soal legitimasi saja, namun Indonesia juga ingin mempopulerkan dan menjual karya seniman nasionalnya melalui Pacific Exposition 2019. Upaya tersebut menjadi penting dalam kontribusi sektor industri dan ekonomi kreatif dalam peningkatan pendapatan nasional Indonesia.

### **Artikulasi Nilai-Nilai Politik Indonesia**

Pelaksanaan Pacific Exposition 2019 juga tidak terlepas dari nilai-nilai politik Indonesia yang hendak dipromosikan kepada kawasan Oseania. Indonesia menggunakan filosofi semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai implementasi multikulturalisme. Multikulturalisme Indonesia dimunculkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa. Sehingga, meskipun di satu sisi Indonesia adalah negara yang tergabung dalam negara-negara Asia Tenggara, namun di sisi lain Indonesia juga mengaku sebagai bagian dari Oceania, terutama Melanesia. Ini karena Indonesia mengakui keberadaan suku bangsa di Timur yang secara budaya adalah bagian dari Melanesia. Hal tersebut direfleksikan dengan adanya seni pertunjukan kebudayaan dan mengundang berbagai masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam Pacific Exposition 2019.

Indonesia juga menghadirkan perwakilan masyarakat lokal dari provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kehadiran masyarakat lokal dari 5 provinsi tersebut untuk menunjukkan keterkaitan etnisitas masyarakat Indonesia Timur dengan masyarakat Oseania, terutama etnis Melanesia (Smith, 2019). Kehadiran masyarakat dari 5 provinsi tersebut juga

merefleksikan nilai *Melanesian Way*, yaitu nilai solidaritas antarmasyarakat etnis Melanesia yang dibuktikan dengan adanya interaksi satu sama lain atas dasar kebudayaan serta etnisitas yang sama. Hal tersebut juga menjadi upaya Indonesia untuk mempertemukan dan menghubungkan masyarakat Indonesia Timur dengan masyarakat Melanesia untuk berdialog melalui Pacific Exposition 2019.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mengundang pemerintah dan akademisi untuk berdiskusi dalam forum-forum regional dalam Pacific Exposition 2019. Adanya pertemuan masyarakat Oseania dan diskusi dalam forum regional dapat menciptakan kesepahaman tentang konstruksi identitas regional yang harus dilestarikan. Menghadirkan seluruh lapisan masyarakat Oseania juga menunjukkan adanya rasa persahabatan berdasarkan identitas kolektif Oseania sebagai elemen kunci dalam integrasi kawasan tersebut.

Dalam pembukaan Pacific Exposition 2019, Indonesia memperkenalkan inisiasi *Pacific Elevation* dalam penguatan hubungan diplomatik, kerja sama regional, serta sebagai komitmen dalam upaya pembangunan di Oseania (Kabutaulaka, 2020; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Program ini merupakan kelanjutan dari Pacific Engagement yang sebelumnya dijalankan. Menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melalui program ini, Indonesia berkomitmen untuk membantu pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pasifik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021). Dalam pidatonya pada pembukaan Pacific Exposition 2019, Retno Marsudi menyebut bahwa *Pacific Elevation* juga merupakan penegasan tentang persaudaraan antar negara-negara Pasifik sebagai sebuah komunitas yang tersatukan oleh persamaan identitas. *Pacific Elevation* juga menjadi dasar dari upaya Indonesia untuk melakukan kerjasama secara multilateral di kawasan Oseania.

### **Refleksi Politik Bebas Aktif di Oseania**

Politik luar negeri bebas aktif merupakan doktrin politik yang diterapkan Indonesia dalam melakukan hubungan luar negerinya. Menurut Hatta (1953) Indonesia perlu untuk menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai negara di dunia secara damai dan kooperatif, sekalipun ideologi dan sistem pemerintahannya berbeda (Hatta, 1953). Fokus utama politik bebas aktif juga mengacu kepada amanat Pembukaan UUD 1945 untuk menciptakan hubungan luar negeri berdasarkan senantiasa menjaga perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum yang berorientasi pada pembangunan, serta mewujudkan keadilan sosial secara global sebagai kepentingan nasionalnya (Acharya, 2015).

Kontekstualisasi politik luar negeri bebas aktif terlihat dari adanya kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Selandia Baru. Indonesia memilih Selandia Baru sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pacific Exposition 2019. Opsi tersebut dipilih dengan pertimbangan Indonesia terhadap posisi dan pengaruh Selandia Baru dalam politik regional Oseania. Dalam konteks ekonomi, Selandia Baru merupakan salah satu negara dengan GDP terbesar di Oseania. Pada tahun 2018, Selandia Baru menjadi memiliki GDP terbesar di Oseania dengan nominal USD 3,2 juta (World Bank, 2018b). Sedangkan, Australia berada di posisi kedua dengan GDP sebesar USD 2,8 juta pada tahun yang sama (World Bank, 2018a). Selain itu, adanya letak geografis Selandia Baru yang berada diantara Australia dan negara-negara kepulauan Oseania dapat mendukung keterjangkauan akses produk Indonesia yang dipromosikan dalam Pacific Exposition 2019.

Pada Pacific Exposition 2019 pula, Indonesia juga membuka hubungan diplomatik baru dengan negara Oseania, yaitu dengan Kepulauan Cook dan Niue (Maharani, 2019a). Pembukaan hubungan diplomatik ini menandakan Indonesia yang berusaha memperluas pengaruh serta hubungan diplomatiknya untuk memperoleh legitimasi dari negara-negara Oseania. Pembukaan hubungan diplomatik dapat difokuskan Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan diplomasi kepada setiap negara Oseania, terutama Kepulauan Cook dan Niue. Dukungan negara-negara Oseania dari pembukaan hubungan diplomatik menjadi modalitas penting Indonesia dalam kontestasi politik regional dan internasional, terutama saat melakukan pemungutan suara dalam konferensi regional *Pacific Islands Forum* (PIF) dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk mendukung pembangunan regional, Indonesia mengakomodasi pameran ekspor dan impor negara-negara Oseania dalam *Trade Exhibition*. Negara-negara Oseania dapat menjual komoditi-komoditi ekspor strategisnya dengan membuka *booth* pada Pacific Exposition 2019, seperti Australia, Selandia Baru, dan difokuskan untuk meningkatkan volume ekspor negara-negara kepulauan di Oseania, Tuvalu, Kiribati, Nauru, dan Niue. Ketika negara-negara tersebut dapat menjual komoditi ekspornya, maka mereka akan memperoleh laba atas penjualan produk dari Pacific Exposition 2019. Dengan upaya tersebut, Indonesia berperan dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan di Oseania dengan mengakomodasi promosi dan penjualan produk negara-negara di dalamnya.

Tidak hanya keuntungan bagi negara-negara Oseania saja, Indonesia juga dapat mengeksport produknya melalui Pacific Exposition 2019. Indonesia memperoleh keuntungan atas penjualan produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari 5 provinsi yang hadir (Kandipi, 2019; Rahayu, 2021). Promosi dan penjualan produk-produk dari perusahaan Indonesia tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor dan neraca perdagangan Indonesia ke Oseania. Hasil penjualan produk-produk ekspor Indonesia dalam Pacific Exposition 2019 dapat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan perkapita Indonesia. Dalam *Trade Exhibition*, Indonesia memperoleh transaksi atas produk nasionalnya sebesar USD 70,3 juta atau senilai IDR 1 triliun (Maharani, 2019d). Dari hasil transaksi tersebut, beberapa produk ekspor Indonesia yang memiliki pendapatan terbesar pada Pacific Exposition 2019 berada pada sektor *fashion*, pariwisata, transportasi, alutsista, produk kebudayaan daerah, teknologi ramah lingkungan, tenaga kerja terampil, serta pangan (agrikultur) (Maharani, 2019d).

Beberapa perusahaan Indonesia yang menjual produknya di Pacific Exposition 2019, antara lain PT. Industri Kereta Api Indonesia (INKA) yang menjual gerbong *flat top wagon*, PT. PINDAD dan PT. Dahana Persero yang menjual alutsista dan bahan peledak, PT. Astra Internasional yang menjual mobil tipe *multipurpose vehicle* (MPV), PT. Dirgantara Indonesia yang menawarkan rute penerbangan Indonesia ke negara-negara Oseania, serta UMKM asal 5 provinsi Indonesia yang menjual produk khas dan destinasi pariwisata daerah (Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), 2019b). Indonesia juga memperoleh permintaan, penawaran, dan kerja sama perdagangan melalui *Pacific Business Forum* dan *Pacific Tourism Forum* untuk mempromosikan destinasi pariwisatanya. Maka dari itu, Pacific Exposition 2019 juga menjadi upaya ekspansi pasar perusahaan-perusahaan asal Indonesia. Adanya ekspor kepada negara-negara Oseania juga dapat berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan kawasan tersebut.

## Kesimpulan

Dalam mengaktualisasikan kehadiran dan pengaruhnya di kawasan Oseania, Indonesia merefleksikan sumber daya soft power yang dimiliki untuk menginisiasi agenda Pacific Exposition 2019. Dalam konteks sumber daya kebudayaan, Indonesia menghadirkan kebudayaan masyarakat Timur yang memiliki persamaan dengan masyarakat Oseania, terutama Melanesia. Pentas kebudayaan dihadirkan untuk menunjukkan adanya nilai luhur dan nilai kesejarahan yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia Timur dengan masyarakat Oseania. Selain bertujuan untuk mengkolaborasi karya dari para seniman, pentas musik dan *fashion show* dalam Pacific Exposition 2019 juga digunakan mempromosikan karya-karya budaya populer Indonesia kepada negara-negara Oseania.

Penyelenggaraan Pacific Exposition 2019 merefleksikan implementasi nilai-nilai politik yang diadopsi oleh Indonesia, yaitu multikulturalisme. Berangkat dari adanya keberagaman kebudayaan nasional, nilai multikulturalisme Indonesia dalam Pacific Exposition 2019 berangkat dari prinsip Bhineka Tunggal Ika. Artinya, sekalipun kebudayaan masyarakat berbeda-beda, mereka dapat dipersatukan dengan adanya pemahaman atas filosofi kebudayaan masyarakat. Nilai demokrasi yang juga diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila dengan menghadirkan masyarakat umum serta mengadakan forum jajak pendapat pada rangkaian Pacific Exposition 2019. Kehadiran masyarakat Indonesia Timur juga merefleksikan penggunaan narasi politik identitas Indonesia dalam interaksinya dengan masyarakat di negara-negara Oseania.

Pacific Exposition 2019 juga menjadi implementasi politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki Indonesia. Inisiasi Pacific Exposition 2019 menunjukkan adanya kebebasan Indonesia untuk melakukan hubungan kerja sama dan dukungan dengan Selandia Baru dan Australia. Selain itu, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Kepulauan Cook dan Niue juga menunjukkan adanya kebebasan Indonesia untuk mengaktualisasikan kehadiran dan pengaruhnya dengan negara-negara Oseania. Perwujudan nilai kesejahteraan sosial di Oseania dapat terlihat dari adanya *Trade Exhibition* dan forum-forum investasi yang memungkinkan Indonesia untuk menyediakan berbagai komoditi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di sana. Hal tersebut juga dapat menghadirkan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam *regional supply chain* di Oseania. Secara khusus, pameran perdagangan dan investasi dalam Pacific Exposition 2019 juga dapat membantu neraca perdagangan Indonesia dengan Oseania menjadi positif.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan pendekatan dari disiplin ilmu lain, terutama ilmu antropologi dan etnomusikologi. Analisis dan dua bidang ilmu tersebut untuk semakin memperdalam pemahaman terkait kedekatan budaya antara Indonesia dengan Oceania, terutama Melanesia. Sedangkan untuk rekomendasi praktis, penulis merekomendasikan agar *Pacific Exposition* menjadi agenda rutin Indonesia di kawasan Oseania selain untuk mempertahankan kehadiran di kawasan, juga untuk menempatkan kawasan ini sebagai “halaman depan” di sisi Timur, bukan lagi halaman belakang. Hal tersebut juga relevan dengan keberlanjutan hubungan Indonesia dengan negara-negara Oseania di masa depan.

## Referensi

- Acharya, A. (2015). *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. World Scientific Publishing.
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, 1(2), 1–13.
- Ariyanti, H. (2019). *Kerap Culik WNI, Sekuat Apa Kelompok Abu Sayyaf dan Dari Mana Logistik Mereka?* Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/dunia/kerap-culik-wni-sekuat-apa-kelompok-abu-sayyaf-dan-dari-mana-logistik-mereka.html>
- ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Key Figures 2019*. ASEAN Secretariat.
- Asia Today. (2020). *Pacific Exposition 2019: Kolaborasi Membangun Industri Kreatif, Musik dan Budaya*. Asia Today. <https://asiatoday.id/read/pacific-exposition-2019-kolaborasi-membangun-industri-kreatif-musik-dan-budaya>
- Astra Internasional. (2019). *Astra Dukung 1st Pacific Exposition 2019 Yang Dihadiri 20 Negara*. <https://www.astra.co.id/Media-Room/Press-Release/Astra-Dukung-1st-Pacific-Exposition-2019-Yang-Dihadiri-20-Negara>
- Chow, M. (2020). *Southeast Asia's Transboundary Haze: Obstacles to a Regional Solution*. Global Risk Insights. <https://globalriskinsights.com/2020/09/southeast-asias-transboundary-haze-obstacles-to-a-regional-solution/>
- Davies, M., & Franklin, M. I. (2015). What Does (the Study of) World Politics Sound Like? In F. Caso & C. Hamilton (Ed.), *Popular Culture and World Politics: Theories, Methods, Pedagogies* (hal. 120–147). E-International Relations Publishing.
- de Magalhaes, J. C. (1988). *The Pure Concept of Diplomacy*. Greenwood Press.
- Elmslie, J. (2015). Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities. In R. Aizizan & C. Cramer (Ed.), *Regionalism, Security and Cooperation in Oseania*. Asia-Pacific Center for Security Studies Press.
- Habrianto, S. (2020). *10 Kemiripan Bahasa Maori dengan Indonesia, Sering Kalian Gunakan!* IDN Times. <https://www.idntimes.com/life/education/sahrul-habrianto/bahasa-maori-c1c2/10>
- Hatta, M. (1953). Indonesia's Foreign Policy. *Foreign Affairs*.
- Hau'ofa, E. (1994). Our Sea of Islands. *The Contemporary Pacific*, 6(1), 148–161.
- Hau'ofa, E. (1998). The Ocean in Us. *The Contemporary Pacific*, 10(2).
- Kabutaulaka, T. (2020). *Indonesia's "Pacific elevation": Elevating what and who?* Griffith University. <https://blogs.griffith.edu.au/asiainsights/indonesias-pacific-elevation-elevating-what-and-who/#:~:text=In July 2019%2C at the,elevated engagement with the region.>
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (2019a). *INDONESIA BUSINESS DELEGATES: The First Pacific Exposition Business & Investment Forum*.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (2019b). *INDONESIA BUSINESS DELEGATES: The First Pacific Exposition Business and Investment Forum*.
- Kandipi, H. D. (2019). *123 perusahaan berpartisipasi dalam Pacific Exposition 2019*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/953884/123-perusahaan-berpartisipasi-dalam-pacific-exposition-2019>
- Kapisa, S. (1994). Eksistensi Wor Biak dan Upaya Pelestariannya. *Seminar Jurusan Antropologi*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Semua Berawal dari Persahabatan: Melalui Pacific Exposition 2019, RI Ciptakan Momentum Pasifik. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/450/berita/semua-berawal-dari-persahabatan-melalui-pacific-exposition-2019-ri-ciptakan-momentum-pasifik>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). Negara-Negara di Pasifik adalah Prioritas Bagi Indonesia. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2296/berita/negara-negara-di-pasifik-adalah-prioritas-bagi-indonesia>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Bersama KBRI New Zealand*,

- Kemendikbud Selenggarakan Pasific Cultural Forum Di Selandia Baru*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bersama-kbri-new-zealand-kemendikbud-selenggarakan-pasific-cultural-forum-di-selandia-baru/> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Peta Diplomasi Perdagangan Internasional*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih pertahanan Indonesia* (3 ed.). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Khumaini, A. (2019). *Promosi Wonderful Indonesia Digas Dubes Tantowi di Pasific Exposition 2019*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/gaya/promosi-wonderful-indonesia-digas-dubes-tantowi-di-pasific-exposition-2019.html>
- Lantang, F., & Tambunan, E. M. B. (2021). The Internationalization Of “West Papua” Issue And Its Impact On Indonesia’s Policy To The South Pacific Region. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 41–59.
- Lee, Y. (2011). *ASEAN Matters! Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations*. World Scientific Publishing.
- Local Government of New Zealand. (n.d.). *Waiwhetu Marae Pohiri Process*. Diambil 2 Februari 2022, dari <https://www.lgnz.co.nz/assets/Uploads/Waiwhetu-Marae-Pohiri-Process.pdf>
- Maharani, T. (2019a). *Indonesia Buka Hubungan Diplomatik dengan Niue dan Kepulauan Cook*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4621706/indonesia-buka-hubungan-diplomatik-dengan-niue-dan-kepulauan-cook>
- Maharani, T. (2019b). *Meriah, 19 Negara dan 123 Perusahaan Ramaikan Pacific Exposition 2019*. KOMPAS. <https://news.detik.com/berita/d-4622717/meriah-19-negara-dan-123-perusahaan-ramaikan-pacific-exposition-2019>.
- Maharani, T. (2019c). *Pembukaan Pacific Exposition 2019, PM-Menteri Negara Pasifik Tabuh Tifa*. KOMPAS. <https://news.detik.com/berita/d-4621039/pembukaan-pacific-exposition-2019-pm-menteri-negara-pasifik-tabuh-tifa>.
- Maharani, T. (2019d). *RI Catat Potensi Transaksi US\$ 70 Juta di Pacific Expo 2019 Auckland*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4623806/ri-catat-potensi-transaksi-us-70-juta-di-pacific-expo-2019-auckland>
- Mazer, S. (2011). Performing Māori: Kapa Haka on the Stage and on the Ground. *Popular Entertainment Studies*, 2(1), 41–53.
- Nugraha, M. H. R. (2017). Perencanaan Strategis Pertahanan Masa Depan Indonesia: Analisis Pada Lingkungan Strategis Asia Tenggara (Asean) Periode 2015-2020. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(3), 158–169.
- Nugraheny, D. E. (2020). *Mendagri Ungkap Sejumlah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga*. KOMPAS. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success In World Politics*. Public Affairs.
- OECD. (2019). *Indonesia Trade Data*. Organisation for Economic Cooperation and Development. <https://oec.world/en/profile/country/idn>
- Pacific Exposition Official Website. (2021). *Pacific Exposition 2019 Flashback*. Pacific Exposition Official Website. <https://v2.pacificexposition.co.nz/>
- Pratama, P. A., & Sulaiman, Y. (2021). The Pacific Exposition 2019 Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Pendekatannya Dengan Kawasan Pasifik. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 257–258.
- Rahayu, J. T. (2021). *Indonesia genjot transaksi dalam Pacific Exposition 2021*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/2473921/indonesia-genjot-transaksi-dalam-pacific-exposition-2021#:~:text=Pada gelaran 2019%2C hanya tersedia,ikut serta untuk mempromosikan produknya>.

- Rai, I. W. (2020). TIFA DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF ETNOMUSIKOLOGI. *Jurnal Arkeologi Papua*, 12(2), 115–132.
- Rumansara, E. H. (2003). Transformasi Upacara Adat Papua: Wor dalam Lingkaran Hidup Orang Biak. *Humaniora*, 15(2), 212–223.
- Satriawan, A. (2016). Kebijakan Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Negeranegara Kawasan Pasifik (Tuvalu, Nauru, Kiribati). *JOM FISIP UNRI*, 3(2).
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Sinaga, O., & Robertua, V. (2017). Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power. *Global Strategis*, 11(2), 73–83.
- Smith, M. (2019). *Indonesia's "Pacific Elevation": Step up or power play?* Radio New Zealand. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/394434/indonesia-s-pacific-elevation-step-up-or-power-play>
- Sobuber, L. (2019). *The First Pacific Exposition 2019 Jadi Ikatan antara Indonesia dengan Pasifik*. Papua.us. <https://www.papua.us/2019/07/the-first-pacific-exposition-2019-jadi.html>
- Slatter, C. (2015). The New Framework for Pacific Regionalism: Old kava in a new tanoa? In G. Fry & S. Tarte (Ed.), *The New Pacific Diplomacy* (3rd eds., hal. 49–64). Australian National University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta Bandung.
- van den Haak, M. (2018). High culture unravelled: A historical and empirical analysis of contrasting logics of cultural hierarchy. *Human Figurations*, 7(1).
- van Ham, P. (2005). Power, Public Diplomacy, and the Pax Americana. In J. Melissen (Ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Wardhani, B. L. S. (2015). *Kajian Asia Pasifik*. Intrans Publishing.
- World Bank. (2018a). *GDP Growth of Australia*. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AU-NZ>
- World Bank. (2018b). *GDP Growth of New Zealand*. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AU-NZ>
- World Bank. (2020). *GDP Pacific Island Small States*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=S2>
- Yahya, T. (2020). *Rebonding with Our Pacific Neighbours*.
- Yahya, T. (2021). *The 2nd Pacific Exposition: Peluang Networking ke Pasar Pasifik*.
- Zhang, D. (2020). China in the Pacific and Traditional Powers' New Pacific Policies: Concerns, Responses and Trends. *Security Challenges*, 16(1), 78–93.